

## BAB I.

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak mendapatkan diskriminasi berdasarkan identitas gender (Larasati dan Ayu, 2020). Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu dari 17 poin *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, kesetaraan gender juga merupakan salah satu tujuan dari deklarasi universal hak asasi manusia oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum. Tujuan dari kesetaraan gender adalah agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam kehidupan bermasyarakat (Larasati dan Ayu, 2020). Untuk mengetahui tingkat kesetaraan gender pada suatu negara, dibutuhkan sebuah indeks pengukuran. Terdapat beberapa indeks untuk mengukur kesetaraan gender, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indonesia berada pada peringkat 101 dari 156 negara dalam hal kesenjangan gender (Purnamasari, 2021). Beberapa indikator digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berlandaskan gender, beberapa diantaranya adalah IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kesetaraan gender di bidang kehidupan bermasyarakat merupakan isu yang harus diperhatikan. Pada bidang ekonomi misalnya, rata-rata gaji karyawan perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, yakni Rp 2,45 juta untuk perempuan dan Rp 3,17 juta untuk laki-laki, berdasarkan data per Agustus 2019 (Putri, 2020). Kemudian pada bidang ketenagakerjaan, sebelum adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), jumlah angkatan kerja perempuan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan di negara lain. Hal tersebut diperparah dengan adanya pandemi (DPR RI, 2021). Selain itu, kesetaraan gender di bidang politik juga mengalami penurunan, contohnya representasi perempuan di parlemen mengalami penurunan pada 2019 sebesar 2,4% dibandingkan dengan tahun 2018 (Putri, 2020). Dengan demikian, pentingnya

dilakukan upaya peningkatan kesetaraan gender dengan mengontrol faktor-faktor yang terkait yang berhubungan terhadap IPG.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait IPG, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018), Cahyati dkk. (2019), dan Safitri dkk. (2020). Sari (2018) memodelkan IPG di Provinsi Jawa Barat berdasarkan metode regresi nonparametrik spline multivariabel pada data tahun 2016. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengeluaran berdasarkan gender, dan keterlibatan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap IPG. Kemudian, Cahyati dkk. (2019) memodelkan IPG berdasarkan pendekatan regresi probit ordinal dengan data tahun 2015 tingkat kabupaten/kota di Sumatera. Pada penelitian tersebut, IPG dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa AHH, HLS, dan pengeluaran kapita yang disesuaikan berpengaruh signifikan terhadap IPG. Selanjutnya, Safitri dkk. (2020) memodelkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IPG di Indonesia berdasarkan metode regresi probit biner bivariat dengan data tahun 2017. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jumlah perempuan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap IPM dan IPG.

Kelemahan yang dimiliki oleh Sari (2018), Cahyati dkk. (2019) adalah menggunakan data *cross section* untuk satu provinsi. Padahal, pengaruh variabel prediktor terhadap IPG antara satu provinsi dengan provinsi lainnya berbeda. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta bahwa terdapat perbedaan selisih data IPG sebesar 1,79 untuk Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020. Contoh selanjutnya adalah data IPG Provinsi DI Yogyakarta dengan Jawa Tengah memiliki selisih sebesar 2,88 pada tahun 2019. Selanjutnya, walaupun Safitri dkk. (2020) telah membuat model dengan data *cross section* untuk semua provinsi di Indonesia, tetapi hanya satu periode yang digunakan. Padahal faktanya, terdapat fluktuasi data IPG dari tahun ke tahun, misalnya IPG untuk Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 0,14 dari tahun 2018 ke 2019 dan 0,16 dari

tahun 2019 ke 2020. Oleh karena itu, pengusul memodelkan IPG di Indonesia berdasarkan metode regresi data panel pada data periode 2016 – 2020.

Regresi data panel merupakan regresi dengan jenis data yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Rahmah, 2016; Gujarati, 2004). Model data panel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan hanya menggunakan *cross section* atau *time series* saja. Salah satu kelebihan tersebut adalah data panel memberikan hasil yang lebih informatif dan variatif (Hidayat dkk., 2018). Data panel lebih baik digunakan karena dapat mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat diukur pada data *cross section* atau *time series* secara individual. Dengan menggunakan regresi data panel, karakteristik individu dapat diperhatikan berdasarkan unsur *cross section* dan *time series* dari masing-masing variabel penelitian. Hal tersebut berarti bahwa estimasi yang dihasilkan akan lebih mendekati nilai aktual (Agusalim dkk., 2019). Kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh regresi data panel adalah cocok digunakan untuk data yang berfluktuasi. Hal tersebut cocok digunakan pada penelitian ini karena data yang dimiliki oleh pengusul berfluktuasi. Selain itu, pada kenyataannya, pengaruh variabel prediktor terhadap IPG di setiap provinsi berbeda. Salah satu pengaruh tersebut diasumsikan karena intersep yang berbeda pada setiap provinsi.

Penelitian ini menggunakan IPG sebagai variabel respon dan IDG, AHH perempuan, APS tingkat SD, SMP, dan SMA, serta pertumbuhan ekonomi atau laju PDRB atas dasar harga konstan sebagai variabel prediktor. Kebaruan dari penelitian ini adalah memodelkan IPG di Indonesia berdasarkan metode regresi data panel pada data tahun 2016 – 2020. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa RI) sebagai acuan dalam menentukan kebijakan untuk menekan kesenjangan gender dengan meningkatkan IPG Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mendeskripsikan IPG beserta variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadapnya di Indonesia pada tahun 2016 – 2020?
2. Bagaimana memodelkan IPG di Indonesia berdasarkan metode regresi data panel?
3. Bagaimana menginterpretasikan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IPG di Indonesia berdasarkan metode regresi data panel?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan IPG beserta variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadapnya di Indonesia pada tahun 2016 – 2020.
2. Memodelkan IPG di Indonesia berdasarkan metode regresi data panel.
3. Menginterpretasikan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IPG di Indonesia berdasarkan metode regresi data panel.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat

Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IPG dan wawasan tentang pentingnya kesetaraan gender di Indonesia.

2. Bagi pemerintah

Menjadi tolak ukur pemerintah, khususnya Kemenpppa RI, dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPG sehingga pemerintah dapat menekan kesenjangan gender di Indonesia.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi lingkup pembahasan, yaitu data yang digunakan merupakan data dari tahun 2016 – 2020 untuk 34 provinsi di Indonesia yang tersedia di website tabel dinamis Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia maupun di publikasi Statistik Indonesia tahun 2017 – 2021 yang diterbitkan oleh BPS Indonesia.